

**JURNAL**

# **EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Volume: 3. NO: 01, JANUARI-JUNI 2010**

**PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU**



**ISSN 1979-7338**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI BENGKULU**

**Fitrianti, Handoko Hadiyanto, Yusnida**

**PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DI  
KABUPATEN LEBONG**

**Syarifudin, Agustina Retno Eka Putri, BIE. Indraswanti**

**ANALISIS HUBUNGAN KINERJA DENGAN HARAPAN KARIER DAN  
KARAKTERISTIK PERAWAT PELAKSANA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN  
DALAM PERENCANAAN SDM DI RUMAH SAKIT DR. M. YUNUS BENGKULU  
TAHUN 2009**

**Iraria Tatum Nathalie, M.Abduh, Purmini**

**ANALISIS KONTRIBUSI PERTUMBUHAN TOTAL FAKTOR PRODUKTIVITAS (TFP)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BENGKULU 1986-2007**

**Timbul Parulian Silitonga, Sigit Nugroho, BIE. Indraswati**

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN MODAL USAHA KOPERASI SIMPAN  
PINJAM/ USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI  
DI KOTA BENGKULU**

**Sudirman, Ridwan Nurazi, Merri Anitasari**

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK USAHA  
PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

**Eva Juniarty, Ridwan Nurazi, Sunoto**

**ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI  
BENGKULU**

**Huteman Mulyadi, Lizar Alfansi, Benardin**

**Program Magister Perencanaan Pembangunan  
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu**

**JURNAL EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Program Magister Perencanaan Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU**

**Gedung S Jln. Raya Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu**

**Telp 0736 - 28481 Fax : 0736 - 28481 email : mpp\_feunib@yahoo.com**

**JURNAL**  
**EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

*Vol. 3 NO. 01 JANUARI-JUNI 2010*

*ISSN: 1979-7338*

Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu Fitrianti, Handoko Hadiyanto, Yusnida.....	1-8
Persepsi Stakeholder Terhadap Pengembangan Agropolitan Di Kabupaten Lebong Syarifudin, Agustina Retno Eka Putri, BIE. Indraswanti .....	9-17
Analisis hubungan kinerja dengan harapan karier dan karakteristik perawat pelaksana sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan SDM di rumah sakit dr. M. Yunus Bengkulu Tahun 2009 Irria Tatum Nathalie, M.Abduh, Purmini .....	18-25
Analisis Kontribusi Pertumbuhan Total Faktor Produktivitas (TFP) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu 1986-2007 Timbul Parulian Silitonga, Sigit Nugroho, BIE. Indraswati.....	26-33
Analisis Strategi Pengembangan Modal Usaha Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi Di Kota Bengkulu Sudirman, Ridwan Nurazi, Merri Anitasari.....	34-41
Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkulu Utara Eva Juniarty, Ridwan Nurazi, Sunoto.....	42-50
Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu Huteman Mulyadi, Lizar Alfansi, Benardin .....	51-58

# ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI BENGKULU

## THE ANALYSIS OF EFFECT GENERAL ALLOCATION FUND(DAU) AND DISTRICT ORIGINAL INCOME (PAD) FOR COST DISTRICT REGENCY/CITY IN BENGKULU

By:

Huteman Mulyadi, Lizar Alfansi, Benardin

### ABSTRACT

Autonomic area to be need financial management economically, efficient, effective, transparent and accountable. In reality in destrict regencies city in Bengkulu not like hoped yet, so need for research the ways to solve that's problem. The problem are: (1) what is effect of DAU and PAD for cost district?; (2) what are there flypaper effect? The purpose the research: (1) to know the effect of DAU and PAD for cost district regency city in Bengkulu province; (2) to know the response cost which used to analyze the effect of DAU and PAD (flypaper effect). To analyze the effect of DAU and PAD for cost district using regrestion analysis. Panel pooled data regrestion (regresi data panel) using to looking at the effect each free variable is DAU and PAD for attach variable is cost area. Regrestion do with using method fixed effect, are regrestion which to calculate difference intersep each habit for each cost area. Contribution DAU equally in district regency city in Bengkulu to reach for 70%, 3% PAD and the other income 27%. If looked from both significanitation (PAD and DAU) samesignificant effect but DAU has more effect PAD. Can conclude do flypaper effect.

*Keyword: The effect of DAU and PAD.*

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang semakin luas kepada Daerah untuk memberdayakan diri terutama terkait dengan pengelolaan sumber pendapatan yang dimiliki. Di samping itu juga adanya tuntutan terhadap penciptaan kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional.

Konsekuensi pelaksanaan undang-undang tersebut bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keuangan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan

proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga diharapkan terciptanya kemandirian daerah yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat meningkat, pembangunan daerah berjalan pesat, banyak investor menanam investasi di daerah dan terciptanya pemerintahan daerah yang good governance.

Secara nyata kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD dimana dapat dilihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, dan dari pos mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembangunan dan pendapatan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 dijelaskan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas : a. Pendapatan asli daerah, b. Dana perimbangan, c. Pinjaman daerah dan d. Lain-

lain pendapatan yang sah. Selanjutnya untuk PAD diatur oleh UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan retribusi bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan; (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkir; (h) Pajak Air Tanah; (i) Pajak Sarang Burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan dikeluarkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah akan menambah kekuatan yuridis bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sentral guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Dari harapan yang timbul karena adanya otonomi daerah untuk memajukan pembangunan di daerah sehingga sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia dan memanfaatkan semua resources yang dimiliki seperti terpapar dalam latar belakang, sehingga penulis memandang perlu untuk meneliti hal tersebut sebagaimana peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa dan Bali (2003), bahkan Sumatra (2004). Mencermati fenomena yang terjadi tersebut menjadikan pertanyaan bahwa bagaimana pengaruh masing-masing sumber pendapatan tiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian : Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

### 1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah setiap Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu?

2. Seberapa besar respon belanja terhadap Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (flypaper effect) Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui respon belanja yang ditimbulkan oleh DAU dan PAD (flypaper effect).

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah (Siswanto, 2008). Kesejahteraan yang lebih baik dimungkinkan karena pemerintah daerah semakin fokus memberikan layanan dasar bagi publik yang mencakup lebih banyak masyarakat lokal untuk ambil bagian dalam proses kegiatan pembangunan.

Perinsip-perinsip pelaksanaan otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan

legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan azas tugas perbantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

### 2.1.2. Keuangan Daerah

Sistem sentralisasi yang berlangsung cukup lama di Indonesia (menurut Simanjuntak, 2006) telah memunculkan beberapa isu serius pada sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem keuangan yang baik seharusnya efisien, akuntabel, dan stabil dengan sumber penerimaan yang memadai. Dalam periode 1990an, PAD propinsi secara umum berkontribusi kurang dari 35% dari total anggaran propinsi. Untuk kabupaten/kota, rasio PAD terhadap total anggaran jauh lebih kecil, bahkan cenderung tidak signifikan, yakni hanya sekitar 6% sampai 8%. Pelaksanaan desentralisasi sejak 2001 memberikan harapan pada peningkatan perbaikan penerimaan daerah dan juga implementasi administrasi dan manajemen politik regional.

Menurut Koswara (2000), "kebijakan desentralisasi merupakan strategi baru dalam memasuki era reformasi. Ciri utama suatu daerah yang otonom yakni harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan".

Kesemuanya ini secara jelas dan transparan akan diketahui melalui pertanggungjawaban yang disusun dalam perhitungan anggaran, di mana aspek kemampuan keuangan serta

kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran nampak pada alokasi dana yang disediakan bagi semua unit satuan kerja daerah. Untuk itu guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran anggaran daerah maka terdapat 5 (lima) kebijakan yang harus dipedomani.

1. Kebijakan bidang keuangan: mengupayakan peningkatan PAD bagi perimbangan pendapatan daerah;
2. Kebijakan bidang pengeluaran: diarahkan untuk dan dalam rangka perwujudan program serta penguatan institusi bagi memperkuat basis perekonomian masyarakat;
3. Kebijakan bidang kelembagaan: penekanan pada upaya peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mengemban tugas sesuai visi, misi dan program strategis yang telah ditetapkan;
4. Kebijakan bidang pengawasan: bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, agar mencerminkan suatu manajemen yang kapabel dan akuntabel;
5. Kebijakan dalam mendorong keikutsertaan pihak swasta/lsm dalam membangun daerah sesuai porsi masing-masing.

### 2.1.3. Belanja Daerah atau Pengeluaran Daerah (Local Expenditure)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. (Abdul Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemda, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Penyusunan program dan bagian keuangan). (Haryadi, 2001).

### 2.1.3.1 Belanja Rutin

Dengan telah diberikannya wewenang untuk mengelola keuangan daerah, maka Belanja Rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah, termasuk perangkat eks Kanwil/Kandep yang telah dan akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu diupayakan penghematan untuk Belanja Rutin non Pegawai dengan cara memprioritaskan pembiayaan terhadap belanja yang benar-benar urgen disertai dengan peningkatan disiplin anggaran. (Halim, 2002)

### 2.1.3.2. Belanja Pembangunan

Belanja Pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam pembangunan daerah, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaannya, sehingga kebutuhan mereka dapat dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan prioritas dan kemampuan daerah. (Halim, 2002) Kelompok Belanja meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal (untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah), dan meliputi Belanja administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka (Untuk Bagian Belanja Pelayanan Publik).

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, dengan menyoroti hubungan yang telah dirumuskan sebelumnya.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dokumentasi yang diperoleh dari:

1. Biro Pusat Statistik Bengkulu
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu
3. Dirjen. Perimbangan Keuangan Daerah Departemen Keuangan RI.

## 3.4. Alat Analisis

### 3.4.1. Model Regresi Panel Data (Pooled data regression model)

Penelitian ini akan menggunakan satu variabel terikat yaitu belanja daerah. Sedangkan untuk variabel bebasnya ada dua variabel yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis yang dilakukan dengan menggunakan regresi data panel (Panel pooled data regression) dengan bentuk persamaan:

$$BD_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \epsilon_{it}$$

$i$  = Unit Cross Section Sembilan Kabupaten Kota

$t$  = Unit time series dari tahun 2005 – 2009

$\beta_{0i}$  = Intersep pembanding Kabupaten/Kota.

$\beta_1, \beta_2$  = Koefisien DAU dan PAD

$\epsilon_{it}$  = kesalahan pengganggu

BD = Belanja Daerah.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nilai intersep negatif yaitu tidak berpengaruh secara persamaan terhadap besarnya belanja daerah, namun diartikan bahwa nilai minus yang tertinggi dalam hal ini Kota Bengkulu adalah daerah yang ketergantungan Belanja Daerahnya terhadap DAU dan PAD paling tinggi, disusul Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan Seluma. Sumber penerimaan keempat daerah ini yang paling besar adalah DAU dan PAD begitu juga dengan daerah lainnya.

### 4.2.4 Analisis Ekonomi

Diketahuinya pengaruh DAU maupun PAD terhadap belanja daerah diharapkan Pemda selaku pengambil keputusan dapat menjadi bahan referensi dalam menggunakan APBD. Pertumbuhan anggaran (keuangan daerah) di daerah yang dilihat dari APBD secara keseluruhan didorong oleh beberapa faktor, seperti PAD yang merupakan sector paling bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat di daerah yang tangguh dibidang ekonomi, kreatif dan inovatif dalam mengisi pembangunan di daerah.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim tahun



2003: Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah di Jawa dan Bali hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika dibandingkan pengaruh keduanya bahwa pengaruh DAU yang lebih besar, sehingga terjadi *flypaper effect*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2004): Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/Kota di Sumatera menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim. Sehingga ada kesinkronisasi antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini.

Selanjutnya Keuangan dan anggaran daerah merupakan merupakan alat fiskal pemerintah daerah, adalah bagian integral dari keuangan negara. Menurut Hirawan (2006) salah satu dari implikasi utama dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah meningkatnya secara signifikan jumlah dana pemerintah pusat yang harus didaerahkan. Oleh karena itu pengalokasian sumber keuangan diperuntukkan bagi pemerataan pembangunan sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi daerah, sehingga peranan keuangan dan anggaran daerah akan semakin penting di samping keterbatasan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi perolehan dana dari pemerintah pusat, tetapi juga dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi daerah dalam mengakomodir potensi serta pemecahannya, yang membutuhkan peran aktif masyarakat daerah secara keseluruhan

### 4.3 Implikasi Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Rendahnya PAD

Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang diberikan dari pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukan relatif rendahnya proporsi PAD terhadap total pendaptan

daerah di 9 daerah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu yang rata-rata hanya 3,5% selama tahun 2005 sampai dengan 2009.

Apa yang menyebabkan rendahnya PAD? Sehingga terjadi ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat? Bagaimana alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Penyebab rendahnya PAD: *Pertama* kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua* tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. *Ketiga* hanya sedikit pajak yang dapat diandalkan. *Keempat* bersifat politis seperti kekhawatiran terhadap daerah-daerah yang sumber keuangannya tinggi akan mendorong disintegrasi. *Kelima* kelemahan dalam memberikan subsidi dari pusat ke daerah.

Guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat tentu dengan cara meningkatkan perolehan PAD. Untuk meningkatkan PAD tersebut ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah:

*Pertama*, mengidentifikasi beberapa sektor penopang PAD; (a) sektor unggulan seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, manufaktur dan jasa; (b) porsi pembagian pajak-pajak daerah dan retribusi daerah antara daerah kabupaten/kota harus jauh lebih besar dari pada daerah provinsi; (c) mendata/mendaftar secara modern sumber PAD yang berlokasi di daerah sehingga memudahkan dalam pengumpulan pajak; (d) administrasi pajak daerah.

*Kedua*, perusahaan-perusahaan daerah harus diperbesar atau diperkuat land, SDM, kapital dan tenologinya agar dapat memperluas jaringan usaha, memaksimalkan dan memperbesar keuntungan, menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi pengangguran (*unemployment*).

*Ketiga*, menggali potensi pajak yang dapat diandalkan. Memaksimalkan pajak-pajak yang bersifat ekonomis seperti pajak hotel dan restoran, penerangan jalan, pajak pertunjukan, izin usaha, reklame dll.

#### 4.3.2 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Hal penting lain dari pengaturan keuangan menurut UU No.33/2004 adalah Dana Perimbangan berupa transfer antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten dan kota yang disebut DAU dan DAK. Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus subsidi daerah otonom dan Inpres model orde baru.

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Formula DAU adalah: Alokasi Dasar ditambah Celah Fiskal. Celah Fiskal adalah Kebutuhan Fiskal dikurang Kapasitas Fiskal. Kapasitas Fiskal adalah PAD ditambah DBH Pajak ditambah DBH SDA.

Sebagian besar porsi DAU digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Lebih sedikit yang digunakan untuk belanja pembangunan yang akan menambah investasi maupun modal. Berdasarkan keterangan di atas bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat tersebut dengan cara meningkatkan penerimaan PAD dengan menggunakan strategi-strategi diatas karena jika PAD meningkat akan mempersempit celah fiskal berarti akan mengurangi besar DAU yang akan diterima suatu daerah dan itu berarti akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menerima DAU yang lebih rendah suatu daerah tersebut dikategorikan bukan daerah yang miskin dan terbelakang.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut : Untuk menganalisis menggunakan analisis ekonometrik dengan regresi data panel menggunakan metode fixed effect menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut, berdasarkan Table 4.4.

Penjelasan yang dapat disimpulkan dari hasil analisis data tersebut adalah:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

2. Jika terjadi peningkatan jumlah DAU maka akan meningkatkan belanja daerah. Besaran perubahan DAU maupun belanja daerah sebesar koefisien variable masing-masing yang artinya, jika DAU meningkat Rp.1,00 maka Belanja Daerah meningkat Rp.1,088.

3. Pengaruh PAD terhadap belanja daerah juga akan meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.9,669 jika PADnya meningkat Rp1,00. Hasil estimasi atas koefisien DAU dan PAD tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan yang juga signifikan.

3. Berdasarkan hasil analisis secara ekonomi bahwa dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim tahun 2003: Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika dibandingkan pengaruh keduanya bahwa pengaruh DAU yang lebih besar, sehingga terjadi flypaper effect. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Setyawan tahun 2004: Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/Kota di Sumatera menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim. Sehingga ada kesinkronan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini. Anggaran Keuanganyang kuat juga akan dapat mengantisipasi perkembangan penduduk, human capital, potensi daerah dalam mengakumulasi dana guna membiayai pembangunan dan lain-lain.

4. Uji statistik juga menunjukkan nilai t-Statistik variabel bebas DAU dan PAD masing-masing menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten kota di Bengkulu selama kurun waktu lima tahun tersebut.

Begitu juga dengan hasil nilai probability (F-Statistik) bahwa probabilitas  $< \alpha$  yang berarti variabel bebas (DAU dan PAD) secara



bersama-sama berpengaruh terhadap variable terikat (Belanja Daerah).

## 5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan keuangan daerah khususnya APBD masing-masing daerah di Provinsi Bengkulu melalui pengaturan kenaikan alokasi anggaran belanja pembangunan dan efektifitas penggunaannya, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Selain itu pengeluaran pembangunan merupakan salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah terutama PAD maupun menggali sumber-sumber PAD yang baru.

Sehingga ketergantungan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat dapat semakin dikurangi walaupun tidak sepenuhnya karena PAD merupakan sumber keuangan daerah yang utama dalam penerimaan masing-masing daerah.

## 5.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Lebih Lanjut

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggunakan variabel lain, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim, 2003. Pengaru DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. [www.djapk.go.id](http://www.djapk.go.id) di akses 10 September 2009
- Agus Widarjono, 2007. Ekonometrika: Teori dan Aplikasi. Ekonisia. Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Dartanto, Teguh dan Brodjonegoro, Bambang P.S. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal

di Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Disparitas Antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrika Simultan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume V1 N0. 2 November 2006.

- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah, 2008. Perhitungan Dana Alokasi Umum . Departemen Keuangan RI
- Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. 2003. "Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah".
- Dispenda Kota Bengkulu dengan Tim Asistensi, 2007, "Laporan Identifikasi Potensi PAD Kota Bengkulu Tahun 2007".
- Fitriani. 2001. Analisis Alternative Kebijakan Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Dalam Melaksanakan otonomi Daerah". Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Halim, 2002. "Akuntansi sector public: Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat, Jakarta.
- Hirawan, Susiyati B. 2006 Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Volume V1 N0. 2 Januari.
- Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Daerah.
- Kiranajaya Wihana, Baswir Revrisond dkk, 2000, "Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau Dari Aspek Potensi Penerimaan Daerah", Kerjasama Direktorat Jenderal
- Kuncoro, Mudrajad 2004, Otonomi & Pembangunan Daerah. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Maimunah, Mutiara, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Koswara, E., 2000, "Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya", *Analysis CSIS* XXIX, No. 1, 51 – 52.
- Mahi, Raksaksa 2005 Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Volume VI, No. 1, Juli 2005.
- Mubyarto, 2002. Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel-Th.1-No.9 – November 2002.
- Nurkholis dan Brodjonegoro, Bamabang P.S. 2005. Dampak Desentralisasi Piskal Terhadap Perekonomian Antar Daerah: Analisa Model IRIIO. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Volume VI, No. 1, Juli 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- Perpres RI Nomor.74 tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006.
- Perpres RI Nomor.106 tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007.
- Prakosa, Kesit Bambang, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI* Vol. 8 No. 2, 2004.
- Simanjuntak, Robet A. 2006. Bagi Hasil Pajak Pertambah Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Volume VI No. 2 Januari 2006.
- Siswanto Adrianus Dwi : Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Propinsi di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Volume 12 No. 1 Maret 2008.
- Sulistiyawan Eko, 2004. Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). Diakses Pebruari 2009
- Suparatman. 2001. "Efisiensi dan Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan di Propinsi DKI Jakarta". Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Suwarno. 2007 "Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Finansial Rasio Terhadap Neraca Pemerintahan Daerah, Badan Diklat Depdagri RI.
- Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahyudi, Sri Agustinus, 1996, "Manajemen Strategik - Pengantar Proses Berpikir Strategik", Binarupa Aksara, Jakarta
- Widodo, Hg. Sugeng Triyanto, 1990. "Indikator Ekonomi". Kanisikus, Yogyakarta.